PEMBANGUNAN POLITIK

Tim Penulis:
Ade Putra Ode Amane, Dortje L. Y. Lopulalan, Fahririn, Helin Garlinia Yudawisastra,
Abdul Rahman, Muhammad Nazif, Andi Hartati, Rahmad Palopa,
Yeyen Subandi, Ricky Santoso Muharam, Vina Dini Pravita,
Robert Tua Siregar.

PEMBANGUNAN POLITIK

Tim Penulis:
Ade Putra Ode Amane, Dortje L. Y. Lopulalan, Fahririn, Helin Garlinia Yudawisastra,
Abdul Rahman, Muhammad Nazif, Andi Hartati, Rahmad Palopa,
Yeyen Subandi, Ricky Santoso Muharam, Vina Dini Pravita,
Robert Tua Siregar.

Penerbit Widina

PEMBANGUNAN POLITIK

Tim Penulis:
Ade Putra Ode Amane, Dortje L. Y. Lopulalan, Fahririn, Helin Garlinia Yudawisastra, Abdul Rahman, Muhammad Nazif, Andi Hartati, Rahmad Palopa, Yeyen Subandi, Ricky Santoso Muharam, Vina Dini Pravita, Robert Tua Siregar.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Evi Damayanti

ISBN:
978-623-459-459-1

Cetakan Pertama:
April, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pembangunan Politik telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang "Pembangunan Politik"

Buku ini merupakan wujud perhatian penulis terhadap Pembangunan Politik. Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & Nurcholis, n.d.). Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional. (1) Geografis berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan sistem politik. (2) turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah bagian dan konsekuensi politik dari proses perubahan umum, yaitu konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media dan banyak lagi. (3) Tujuan politik dipahami sebagai proses perubahan menuju tujuan tertentu dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, penegakan hukum, pemerintahan yang baik, dll. (4) Proses perubahan menuju sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh negara sudah berjalan.

Objek formal pembangunan politik terletak pada berfungsinya sistem politik itu sendiri. Berfungsinya sistem politik mempengaruhi dinamika dan mobilisasi kekuasaan. Dengan satu syarat, jika sistem politik dapat disesuaikan dengan tujuan politik individu atau kelompok, maka sistem itu

akan terbentuk. Sebaliknya, ketika sistem politik tidak lagi mampu memberikan apa yang diinginkannya, stabilitasnya akan dipertanyakan. Akibatnya, setiap individu dan kelompok kepentingan mendekonstruksi sistem politik dan berubah. Pembangunan politik selalu berarti perubahan, bukan sebaliknya. Memang di satu sisi perubahan diperlukan untuk pembangunan, namun di sisi lain perubahan juga dapat menghambat pembangunan, padahal pengaruh perubahan sosial dapat merangsang pembangunan. Dialektika antara pembangunan dan perubahan sosial selalu ambigu dan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

April, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENGERTIAN PEMBANGUNAN POLITIK DAN URGENSINYA **1**
A. Pendahuluan 2
B. Sejarah Pembangunan Politik 3
C. Perkembangan Pembangunan Politik 4
D. Pengertian Pembangunan 6
E. Pengertian Pembangunan Politik 8
F. Ciri Pembangunan Politik 12
G. Fungsi Pembangunan Politik 13
H. Perempuan Dalam Pembangunan Politik 15
I. Kabinet Kerja Jokowi: Nawacita Menuju Pembangunan Politik Ke Arah Pematangan Demokrasi 16
J. Rangkuman Materi 19
BAB 2 PERSOALAN-PERSOALAN PEMBANGUNAN POLITIK **23**
A. Pendahuluan 24
B. Partisipasi Politik Masyarakat dan Budaya 25
C. Komunikasi Politik 32
D. Rangkuman Materi 40
BAB 3 BANGSA DAN NEGARA **45**
A. Pendahuluan 46
B. Negara 46
C. Bangsa 51
D. Perbedaan Bangsa dan Negara 55
E. Rangkuman Materi 56
BAB 4 KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI **59**
A. Pendahuluan 60
B. Pengertian Kebijakan Publik 60
C. Pembangunan Ekonomi 65
D. Indikator dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi 66
E. Tujuan Pembangunan Ekonomi 69

F. Dampak Pembangunan Ekonomi 70
G. Hubungan Kebijakan Publik Terhadap Pembangunan Ekonomi 71
H. Implementasi Kebijakan Publik Terhadap
I. Pembangunan Ekonomi 72
J. Rangkuman Materi 75
BAB 5 BUDAYA POLITIK DAN ISU IDENTITAS 79
A. Pendahuluan 80
B. Budaya Politik Indonesia 83
C. Isu Identitas Dalam Politik Indonesia 87
D. Politik Identitas: Ancaman Demokrasi Indonesia 93
E. Rangkuman Materi 98
BAB 6 MODERNISASI DAN INDUSTRIALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK 101
A. Pendahuluan 102
B. Definisi Modernisasi 103
C. Definisi Industrialisasi 104
D. Pembangunan Politik 107
E. Hubungan Modernisasi Dengan Pembangunan Politik 108
F. Hubungan Industrialisasi Dengan Pembangunan Politik 110
G. Hubungan Modernisasi dan Industrialisasi 111
H. Rangkuman Materi 112
BAB 7 PEMBANGUNAN POLITIK DAN GLOBALISASI 115
A. Konsep Pembangunan Politik 116
B. Pengertian Globalisasi 118
C. Dampak Globalisasi terhadap Pembangunan Politik 122
D. Rangkuman Materi 127
BAB 8 INTEGRASI NASIONAL 131
A. Pengertian Integrasi Nasional 132
B. Bentuk Integrasi Nasional 134
C. Jenis Integrasi Nasional 135
D. Pentingnya Integrasi Nasional Terhadap Pembangunan Politik 136
E. Rangkuman Materi 140
BAB 9 HAK ASASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, DAN DEMOKRATISASI 143
A. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sejarahnya 144

B. Demokrasi 149
C. Demokratisasi 154
D. Rangkuman Materi 156
BAB 10 MASYARAKAT MADANI DAN PENDIDIKAN POLITIK 159
A. Pendahuluan 160
B. Pengertian Masyarakat Madani 161
C. Pengertian Pendidikan Politik 164
D. Peran Agen Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik 167
E. Rangkuman Materi 168
BAB 11 *GOOD GOVERNANCE* DAN BIROKRASI 173
A. Pendahuluan 174
B. Ciri-Ciri *Good Governance* 177
C. Paradigma *Good Governance* 178
D. Prinsip-Prinsip *Good Governance* 179
E. Manfaat *Good Governance* 183
F. Birokrasi 183
G. Paradigma Birokrasi Pemerintahan 187
H. Fungsi Birokrasi Pemerintahan 188
I. Rangkuman Materi 188
BAB 12 MOBILITAS SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PELEMBAGAAN SISTEM POLITIK 191
A. Pendahuluan 192
B. Rincian Pembahasan Materi 194
C. Rangkuman Materi 202
GLOSARIUM 205
PROFIL PENULIS 211

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 1: PENGERTIAN PEMBANGUNAN POLITIK DAN URGENSINYA

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 1

PENGERTIAN PEMBANGUNAN POLITIK DAN URGENSINYA

A. PENDAHULUAN

Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & Nurcholis, n.d.). Persoalan minimnya pengetahuan atas ruang lingkup suatu ilmu atau kajian tertentu kadang kala berujung pada blunder dalam penerapan ilmu tersebut ketika dihadapkan dengan persoalan real yang ada di masyarakat. Apalagi dalam debat pembangunan, batasnya sangat luas, oleh karena itu para ahli berusaha menyempurnakan penelitian pembangunan menjadi sub-studi yang spesifik, khususnya penelitian tentang pembangunan politik, (Haridison, 2013).

Pembangunan merupakan topik penting yang terus diperdebatkan, baik di negara terbelakang maupun di negara berkembang dan maju. Meskipun konteks yang dibahas dan metode yang digunakan berbeda-beda, pada prinsipnya ada satu tujuan yang diharapkan dari semuanya, dan itu adalah untuk memindahkan negara mereka dari keadaan aktualnya saat ini ke keadaan yang dianggap sebagai keadaan normatif yang lebih baik, (Hasanah & Musyafak, 2017).

Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional. (1) Geografis berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan sistem politik. (2) turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah

DAFTAR PUSTAKA

Agustang, A., & Agustang, A. (2022). Makna Pembangunan. *OSF Preprints*.

Amane, A. P. O., & Salatun, S. (2022). Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024. Jurnal Clean Goverment, 5(1), 43-52.

Amane, A. P. O., Laali, S. A., Nia, F., Ulfa, M., Hakim, R., Afriawan, A., & Alapia, R. A. (2022). Pekan Penerimaan Anggota Baru GMNI Dalam Membentuk Anggota Marhaenis Yang Progresif Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 4*(3), 49-59.

Baidawi, A., Muhammad, H. A., Usman, S., Wahid, M., Maulana, R. Y., Farisi, M., Darminto, C., Efendi, D., Pratiwi, C. S., Hartati, Putra, F., Haryadi, Rakhman, M. A., Karim, N., Fitriani, R. M., Pahrudin, Hapsa, Zarkasi, Rizal, D., … Bafadhal, F. (2019). Media Aspirasi Konstitusi. *JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi*, *6*(6), 305.

Dori, E., & Jayum, J. (2017). Political Development and Democratization: A Conceptual Analysis. *E-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities*, *12*(3), 1–13.

Haridison, A. (2013). Pembangunan Politik: Demokrasi, Governance, dan Supremasi Hukum. *Jurnal Administrasi Publik*, 1–11.

Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, *12*(3), 409–432. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080

Hendrayady, A., Arman, A., Satmoko, N. D., Afriansyah, A., Heriyanto, H., Sholeh, C., ... & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik.

Karinda, K., Amane, A. P. O., & Lutfi, M. (2022). AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERDAMPAK COVID-19 MELALUI DANA DESA. Jurnal Ilmiah Administrasita', 13(2), 83-93.

Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (n.d.). *Konsep dan Teori Pembangunan*.

Kosandi, M. (n.d.). *Pengertian Pembangunan Politik*.

Maarisit, Y. (2015). PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI DISTRIK YALENGGA KABUPATEN JAYAWIJAYA. *Journal Lyceum*, *3*(1), 1–11.

Muharam, Ricky S., et al. *PENDIDIKAN PANCASILA*. Edited by Masruroh, Aas, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Putra, F. S. D., Abdurohim, D., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). Marketing Politik (Teori dan Konsep).

Ramadhani, Muhammad M., et al. *PENGANTAR ILMU POLITIK*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Mansyur, Alif I., et al. *SOSIOLOGI PERKOTAAN*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Witianti, S. (2016). Demokrasi Dan Pembangunan. *Jurnal Wacana Politik*, *1*(1), 71–76. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 2: PERSOALAN-PERSOALAN PEMBANGUNAN POLITIK

Dr. Dra. Dortje L. Y. Lopulalan, M.Si

Universitas Pattimura.Ambon.

BAB 2

PERSOALAN-PERSOALAN PEMBANGUNAN POLITIK

A. PENDAHULUAN

Pemikiran tentang kebutuhan suatu pembangunan politik yang sesuai dengan keperluan zaman dengan berbagai persoalannya dibicarakan dalam berbagai forum dan kalangan pejabat sipil militer, media massa, dunia perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian bahkan dikalangan pengusaha

Menelisik bagaimana perubahan-perubahan politik yang telah dijalankan oleh para elit politik Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, terlihat adanya interaksi antara faktor-faktor historis, politik, sosial, filosofis, ideologis, institusional, hingga ekonomi. Proses transformasi diperlihatkan kepada kita bagaimana faktor-faktor di atas membentuk struktur dan perilaku politik pada masing-masing era. Jika dielaborasi lebih lanjut, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor di atas pada setiap era termasuk perbedaan diantaranya tingkat perkembangannya.

Konteks sosial, ekonomi, dan historis yang mewarnai perubahan politik juga menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pada era-era sebelumnya. Gagasan demokrasi dan otonomi menjadi landasan dilakukannya perubahan politik pada era reformasi yang berupaya menggeser developmentalisme sebagai gagasan utama pada awal Orde Baru merupakan bagian landasan filosofis dan ideologis yang memengaruhi perubahan tersebut. Partisipasi politik masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dan budaya politik membantu mewujudkan sebuah tujuan negara, keberhasilan sebuah negara tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat bahwa pada dasarnya manusia adalah *zoon politicon.*

Perubahan politik yang terjadi juga disandingkan dengan komunikasi politik berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan pemerintah serta pemerintahan. Komunikasi yang melibatkan pesan politik para aktor

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Verba, G., Sidney. (1984). *Budaya politik, Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. PT. Bina Aksara

Anderson, B. R. O. (1990). *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik Di Indonesia*. Mata Bangsa.

Arifin, Anwar. (2011). *"Komunikasi Politik (Filsafat—Paradigma—Teori -. Tujuan—Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)".* Yogyakarta: Graha. 2 pages.

Djuyandi, Abd. R., Mozin, Sanjaya,. (2020). *Analysis Of Political Parties Communication Management In Indonesian Provincial Governor Direct Ellection* (2017 DKI JAKARTA GOVERNOR ELECTION CASE STUDY). *PJAEE*, *17 (7)*.

Dwidjowijoto, R. Nugroho. (2004). *Komunikasi pemerintahan: Sebuah agenda bagi pemimpin pemerintahan Indonesia*. Elex Media Komputindo.

Faturohman, Wawan, D., Sobari. (2004). *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional.* Surabaya: SIC.

Fisher, A. (1986). *Teori-teori komunikasi.* Rosda Karya: Bandung.

Huntington, S. P. (2003). *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Kantaprawira, R. (1983). *Sistem Politik Indonesia: Suatu model pengantar*. Sinar baru.

mokhtar, L. (2001). *Manusia Indonesia sebuah pertanggungjawaban Mokhtar Lubis*. Yayasan Obor Indonesia.

Muhammad, A. (1992). *Komunikasi organisasi*. Bumi Aksara.

Nimmo., D. (1999). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Pabottingi, M. (1996). *"Bahasa, Kramanisasi, dan Kerakyatan".* Penerbit Mizan.

Robert, D. (1980). *Analisis Politik Modern.* Jakarta: Dewaruci Pers.

Susanto., A. S. (1995). *Filsafat Komunikasi.* Bandung: Binacipta.

Sutoro, E. Y. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan masyarakat*. APMD Press.

Timburas, D. R. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILIHAN KEPALA DESA KALONGAN KECAMATAN KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2019. *2022-03-10. Jurnal Ilmu Politik, 11(2).* https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/39310

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 3: BANGSA DAN NEGARA

Fahririn, S.H., M.H

Universitas Sahid Jakarta

BAB 3

BANGSA DAN NEGARA

A. PENDAHULUAN

Materi ini membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa dan negara serta yang menjadi perbedaan antara bangsa dan negara

B. NEGARA

1. Pengertian Negara

Secara etimologis, negara berasal dari kata *staat* (Belanda dan jerman), *state* (Inggris), *eta* (Perancis), *satuts/satatuum* (Latin), yang diartikan merupakan meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Sedangkan pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Definisi Negara dari para ahli:

1) Roger H. Soltau

   Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

2) Harold J. Laski

   Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok

DAFTAR PUSTAKA

Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
Tundjung Herning, (2020). *Hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
Ni'matul Huda, (2015). *Ilmu Negara*, cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers
Ketut Sudiatmaka, Ni ketut. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Rajawali Pers.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 4: KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si

Universitas Muhammadiyah Bandung

BAB 4

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

We need to revise our economic thinking to give full value to our natural resources. This revised economics will stabilize both the theory and the practice of free-market capitalism. It will provide business and public policy with a powerful new tool for economic development, profitability, and the promotion of the public good - Paul Hawken

A. PENDAHULUAN

Setiap negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya terikat dengan sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan kebijakan publik. Kehadiran kebijakan publik sangat dibutuhkan dan memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Banyak negara dalam menerapkan kebijakan publik dalam berbagai aspek salah satunya adalah aspek ekonomi. Hal ini tidak terkecuali dalam aspek pembangun misalnya terdapat berbagai masalah yang membutuhkan respon dan penanganan pemerintah dalam wujud kebijakan publik. Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk saat ini dan masa depan.

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan dan atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam suatu kebijakan tertentu (Nopralia in Suandi, Suandi, et al., 2022). Berikut dalam tabel dibawah ini tersaji berbagai definisi dari kebijakan publik menurut beberapa pakar.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi, A., Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Masalah Dan Dinamika Implementasi Kebijakan Publik Tentang Transportasi (Kajian Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*(2), 205-218.

Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy [by] Thomas R. Dye*.

https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan/berita/mengenal-kebijakan-publik-912312 (diakses senin, 16 januari 2023)

https://inklusif.bappenas.go.id/indeks (diakses senin, 16 Januari 2023)

https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia (Diakses senin, 16 Januari 2023)

Mariyati, T. (2013). Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, *11*(2), 147-158.

Suandi, Suandi, et al. *KEBIJAKAN PUBLIK*. Edited by Rismawati, N. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Suharno, E. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.

Suryana, H. (2000). Ekonomi sumber daya manusia. *Penerbit Salemba Empat. Jakarta*.

Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. *Jakarta: Pers*.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). Pembangunan ekonomi: Di dunia ketiga, Jilid 1.

Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 5: BUDAYA POLITIK DAN ISU IDENTITAS

Dr. Abdul Rahman, S.Pd, M.Si

Universitas Negeri Makassar

BAB 5

BUDAYA POLITIK DAN ISU IDENTITAS

A. PENDAHULUAN

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa, politik tidak hanya berkisar di arena kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik seperti, politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (Efriza dan Indrawan, 2018).

Pada negara mana pun di dunia, termasuk di Indonesia politik selalu bersentuhan dengan kekuasaan. Politik dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang saling berhampiran dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga bersentuhan dengan aspek kehidupan manusia yang lainnya antara lain ekonomi, sosial, dan budaya. Gejala sosial dijumpai pada hubungan sosial atau interaksi sosial, di mana perilaku individu dipengaruhi oleh individu lain, dan perilaku sekelompok orang dipengaruhi oleh perilaku sekelompok kecil orang lain. Bentuk dari pengaruh tersebut berwujud pada sikap menurut apa yang menjadi kehendak pihak yang mempengaruhi. Artinya, sikap dan perilaku pihak yang terpengaruhi sangat ditentukan oleh pihak yang memengaruhi. Interaksi sosial yang berbentuk hubungan saling mendominasi perilaku antar pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut akan melahirkan sistem kekuasaan. Dengan demikian, pihak yang memiliki kekuatan memengaruhi pihak lain. Hal ini berarti mereka yang memengaruhi telah memiliki kekuasaan (Setiadi dan Kolip, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Alfan. 2022. *Demokrasi Digital.* Bekasi: Penjuru Ilmu.

Chang, William. 2002. *Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi.* Jakarta: Kompas.

Digdoyo, Eko. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Efriza dan Jerry Indrawan. 2018. *Komunikasi Politik: Pemahaman Secara Teoritis dan Empiris.* Malang: Intrans Publishing.

Fautanu, Idzam. 2013. *Filsafat Politik.* Jakarta: Gaung Persada Press.

Kamaluddin, Undang A dan Muhammad Alfan. 2015. *Dinamika Politik di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia.

Koetjaraningrat. 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Lebow, Richard Ned. 2021. "Idenitas" dalam Felix Berenskoetter, *Sketsa Pemikiran Politik Moderen.* Jakarta: Kencana.

Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral.* Malang: Intrans Publishing.

Purnomo, Agus. 2009. *Ideologi Kekerasan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, Kamaruddin dan Efriza. 2019. *Sosiologi Politik.* Malang: Intrans Publishing.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Prenada.

Winarno, Budi. 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi.* Yogyakarta: Media Pressindo.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 6: MODERNISASI DAN INDUSTRIALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK

Muhammad Nazif, S.E., M.M., NCT., CPS., CDMS

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

BAB 6

MODERNISASI DAN INDUSTRIALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK

A. PENDAHULUAN

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik identik dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju adalah pencipta mode dan pelopor dalam hampir setiap kehidupan sosial dan ekonomi sehingga wajarlah bila banyak orang mengharapkan bahwa hal seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. Tetapi penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan seperti ini justru mengundang tantangan dari golongan yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalahkan kebenaran dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industri (Barat) yang dipakai sebagai standard universal dan modern bagi setiap sistem politik. Meskipun demikian, dalam perkembangan sejarah dunia memang bisa ditelusuri pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan maupun norma-norma sosial yang telah menyebar luas ke seluruh pelosok dunia dan oleh masyarakat pada umumnya diakui harus diterima oleh setiap pemerintahan yang ingin dihargai. Banyak dari standar-standar tadi memang berasal dari pertumbuhan masyarakat industri dan perkembangan ilmu dan teknologi, namun sebagian besar kini sudah memiliki dinamikanya sendiri. Partisipasi massa, misalnya, tidak hanya mencerminkan kenyataan-kenyataan sosiologis kehidupan masyarakat industri, tetapi telah juga dipandang sebagai hak mutlak dalam semangat zaman masa kini. Prinsip-prinsip lain seperti tuntutan akan hukum yang berlaku umum, penghormatan atas kemampuan daripada keturunan dan konsep-konsep umum mengenai keadilan dan kewarganegaraan, sekarang nampaknya memperoleh penghargaan yang cukup tinggi dalam setiap kebudayaan sehingga cukup beralasan untuk disebut sebagai standar yang umum bagi kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

https://www.academia.edu/11032916/_PEMBANGUNAN_POLITIK_5_and_6_Modernisasi

https://www.academia.edu/7118572/5_modernisasi_dan_industrialisasi_di_pedesaan

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5847542/apa-itu-modernisasi-yuk-kenali-pengertian-ciri-ciri-dan-dampaknya

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 7: PEMBANGUNAN POLITIK DAN GLOBALISASI

Andi Hartati, S.Sos., M.A

Universitas Tompotika Luwuk Banggai

BAB 7

PEMBANGUNAN POLITIK DAN GLOBALISASI

A. KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK

Konsep pembangunan menjadi sebuah kosakata yang melekat dalam kajian sosial-politik, utamanya Ketika memperbincangkan proses perkembangan sebuah negara, sebuah negara akan memiliki kesan positif Ketika mampu menerjemahkan pembangunan dalam capaian yang diakui oleh berbagai pihak, utamanya Lembaga-lembaga pembangunan internasional.

Istilah pembangunan sangat lekat dengan kata perkembangan. Sebuah negara dikatakan berhasil dalam melakukan pembangunan tatkala negara tersebut mampu menunjukkan perkembangan kehidupan yang lebih baik. Pendefinisian pembangunan sebagai sebuah proses perkembangan tidaklah hadir serta merta. Istilah pembangunan yang dikaitkan dengan perkembangan sebuah negara sejatinya belum terlalu lama muncuk. Lacakan awal menunjukkan bahwa pembangunan sebagai wujud perkembangan sebuah negara muncul pada tahun 1940an (Purnomo et al. 2017). Konstruksi tentang arah perkembangan yang perlu dikejar oleh negara-negara di dunia disusun dan disebarkan oleh negara maju, utamanya Amerika Serikat.

Pembangunan politik merupakan suatu upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang dengan asumsi bahwa negara yang sedang berkembang masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik. Pembangunan politik identik dengan modernisasi yang erat kaitannya dengan perubahan secara menyeluruh terhadap berbagai apek seperti ekonomi, urbanisasi, pendidikan dan lain sebagainya.

Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, Daron. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. [[Crown Business]].

Andrew, Heywood. 2011. Global Politics. New York: Palgraave Macmillan.

Aulakh, Preet S. 2001. "Governance and Globalization." Thunderbird International Business Review 43(6):833–40. doi: 10.1002/tie.1032.

Axford, Barrie. 2013. Theories of Globalization. Malden, USA: Polity Press.

Choudhary, Abdur Rahim. 2011. "AN ANALYSIS OF THE MODALITIES OF ACADEMIC GLOBALIZATION AND ACCEPTANCE CRITERIA FOR FUTURE MODELS." Issues in Information Systems XII (1):473–82.

Christian, Stephen Michael. 2018. "Autism in International Relations: A Critical Assessment of International Relations' Autism Metaphors." European Journal of International Relations 24(2):464–88. doi: 10.1177/1354066117698030.

Clarkson, Stephen, and Lucian W. Pye. 1966. "Aspects of Political Development." International Journal 21(4):534. doi: 10.2307/40184477.

Dedi, Agus. 2016. "Negara-Negara Berkembang Dalam Pusaran Politik Globalisasi Dunia." Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 03(01):1–20.

Ghasemi, Hakem. 2010. "Globalization and International Relations: Actors Move from Non-Cooperative to Cooperative Games." Jurnal Global Dan Strategis 4(1):1–13.

Gindin, Sam., and Leo. Panitch. 2012. "The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire." 456.

Guzel, Arif Eser et al. 2021. "The Impact of Economic, Social, and Political Globalization and Democracy on Life Expectancy in Low-Income Countries: Are Sustainable Development Goals Contradictory?" Environment, Development and Sustainability 23(9):13508–25. doi: 10.1007/s10668-021-01225-2.

Held, David. 1999. "*Global Transformations: Politics, Economics and Culture*." 515.

Huntington, Samuel P. 1965. *Political Development and Political Decay. Vol. 17. Project Muse.*

Huntington, Samuel P. et al. 1976. “No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.” 202.

Jackson, Robert H., and George Sorensen. 2007. Introduction to International Relations: Theories and Approaches - Robert H. Jackson, Georg Sørensen - Google Buku. Third Edit. Oxford New York: Oxford University Press.

Krasner, Stephen D. 2001. “*Abiding Sovereignty*.” *International Political Science Review/Revue Internationale de Science Politique* 22(3):229–51.

Kusumawardhana, and Indra Zulkarnain. 2016. “Globalisation and Strategy: "Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi.” Ilmu Dan Budaya 40(54):6139–60.

Purnomo, Joko et al. 2017. Globalisasi Dan Politik Pembangunan Internasional. Pertama. Malang: Tim UB Press.

Scholte, Jan Aart. 2017. Globalization: A Critical Introduction. United States: Red Globe Press.

Shaw, Martin. 1994. “Global Society and International Relations: Sociological Concepts and Political Perspectives.” 197.

Steger, Manfred B. 2002. “Globalism: The New Market Ideology.” 195.

Steger, Manfred B. 2009. Globalization: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Weiss, Lind A. 2000. “*Globalization and State Power*.” *Development and Society* 29 (1):1–15.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 8: INTEGRASI NASIONAL

Rahmad Palopa, S.Sos., M.Si

Universitas Tompotika Luwuk Banggai

BAB 8

INTEGRASI NASIONAL

A. PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL

Integrasi berasal dari kata *integrare* yang artinya memberi tempat bagi suatu keseluruhan. Kata *integritas* itu sendiri diartikan sebagai suatu keutuhan atau kebulatan. Sehingga istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi Nasional adalah merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama dan faktor kebangsaan lain.

Myron Weiner dalam Juhardi (Agus 2016) memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu:

a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
b. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
c. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
d. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Integrasi nasional menjadi hal yang penting bagi negara yang memiliki beragam suku, ras dan agama seperti Indonesia. Menurut Saffroedin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Andi Aco. 2016. “Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM* 3(1963):19–27.

Astawa, Putu Ari. 2017. “Integrasi Nasional.” *Universitas Udayana* 1–25.

Drake, Christine. 2019a. “Government Response to the Need for National Integration.” Pp. 212–46 in *National Integration in Indonesia*. University of Hawaii Press.

Drake, Christine. 2019b. “National Integration in Indonesia.” *National Integration in Indonesia*. doi: 10.2307/J.CTV9ZCJNV.

Hamid, Abdul. 2016. “DINAMIKA INTEGRASI NASIONAL BANGSA INDONESIA (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama).” *Istiqra* 4(2):319. doi: 10.24239/istq.v4i2.211.319-340.

Hasibuan, Afriadi S., and Djoko Sulistyono. 2018. “Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1(1):1–10.

KEESING, ROGER M. 2014. *File: Geertz Clifford Local Knowledge Further Essays in Interpretive Anthropology 1983.Pdf - Monoskop*.

Muhammad, Nur Rohim, Nunuk Suryani, and Musa Pelu. 2017. “Sikap Integrasi Nasional Ditinjau Dari Pemahaman Nilai- Nilai Sejarah Dan Sikap Sosial Siswa.” *Jurnal CANDI* 15(1):110–23.

Mulyoto. 2011. “NATIONAL INTEGRATION AND ITS PROCESS IN INDONESIA Mulyoto 1.” *International Journal of History Education* XII(1).

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 9: HAK ASASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, DAN DEMOKRATISASI

Dr. Yeyen Subandi, S.I.P., M.A

Universitas Respati Yogyakarta

BAB 9

HAK ASASI MANUSIA (HAM), DEMOKRASI, DAN DEMOKRATISASI

Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan demokrasi dalam suatu negara sangat diperlukan dan dibutuhkan. Demokrasi saat ini menjadi tujuan bagi suatu negara walaupun demokrasi masih perlu proses yang panjang dalam setiap eranya. Abad 21 saat ini apakah negara-negara yang menganut sistem demokrasi semakin demokratis? Atau justru sebaliknya semakin mundur?. Selain itu era saat ini dalam eranya Revolusi Industri 4.0 sudah tentu perihal demokrasi menuju ke arah demokrasi digital dengan menggunakan media internet. Begitu juga dalam sistem demokrasi digital perihal HAM masih ada kaitannya.

A. HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN SEJARAHNYA

Hak Asasi Manusia (HAM) ada kaitannya dengan hukum internasional, dalam A. Patra M. Zen (2006) Peiter van Dijk menjelaskan bahwasanya HAM merupakan bagian dari hukum internasional, dan paling tidak dimulai dari pengakuan hukum humaniter (Zen., 2006). HAM dan manusia dalam dan untuk haknya sedikit sulit keduanya untuk dipisahkan, dari lahirnya manusia di muka bumi sudah memiliki dan membawa hak-haknya yang secara kodrat melekat dalam hidupnya. Terlepas dari tuntunan dan tuntutan dengan Tuhannya merupakan makhluk yang bebas. Mengutip dari pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwasanya manusia dalam perjalanannya yang semakin berkembang dalam potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah kedepannya (Wilujeng, 2013).

Pemaknaan HAM banyak sumber literatur yang menuliskan, dalam penulisannya memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, tetapi memiliki prinsip yang sama, diantaranya menurut Mariam Budiardjo dan Thomas Jefferson. Pendapat pertama menurut Mariam Budiardjo,

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. (2006). Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ari Rahayu Wilujeng. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. Humanika. Vol. 18. No. 2. Desember. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Bertens, Kees. (1971). Sejarah Filsafat Yunani. Yogyakarta: Kanisius.

George Sorensen. (1993). Democracy and Democratization, Process and Prospect in a Changing World. Oxford: Westview Press Inc.

Georg Sorensen. (2003). Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Heru Nugroho. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Volume 1 No.1. Universitas Gadjah Mada.

Ibrahim. (2010). Demokratisasi: Ikhtiar Budaya dan Nilai Menuju Demokrasi. Jurnal Progresif Volume III. No. 1. Juni. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

IDEA adalah *Institute for Democracy and Electoral Assistance yang berpusat di Stockholm.*

Lechman, David. (1989). Democracy and Development in Latin America. Cambridge: Polity Press.

Majalah What is Democracy. (1991). United State Information Agency.

Mariam Budiharjo. (1985). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Mangun Wijaya. (1994). Dalam Sidney Hook “Sosok Filsuf Humanisme Demokrasi Dalam Tradisi Pragmatisme”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Purwo Santoso. (2009). Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi, Makalah yang disampaikan dalam *Intensive Course and Training on Human Right-Based Democracy 2009: Power, Welfare, and Democracy.* 13-18 Desember Yogyakarta.

Tornquist, Olle & Nicolaas Warouw. (2009). Memahami Demokrasi: Beberapa Catatan Pendahuluan tentang Konsep dan Metode dalam Demokrasi di Atas Pasir. Jakarta: Demos.

Urofsky, Melvin I. (2002). Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi dalam Politik, Demokrasi, & Manajemen Komunikasi. Yogyakarta: Galang Press.

Yasin Tasrif. (1999). Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia. Makalah Dalam Lokakarya Integrasi Materi HAM ke Dalam Mata Kuliah Umum. Universitas Diponegoro. Semarang.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 10: MASYARAKAT MADANI DAN PENDIDIKAN POLITIK

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 10

MASYARAKAT MADANI DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat madani atau serin dikenal dengan civil society dalam proses transformasi demokrasi sangat menentukan keberhasilan suatu proses tidak jarang ditentukan oleh para elit pemegang kekuasaan. Fenomena adanya proses demokrasi yang berskala global dalam menjelaskan berbagai gerakan masyarakat madani dalam menuju perubahan sistem demokrasi banyak dikaji dan diteliti. Dalam perkembangan ilmu politik, wacana masyarakat sipil memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Sejak Aristoteles, konsep tersebut menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ilmuwan politik. Namun, istilah tersebut tampaknya mengambil nuansa yang berbeda pada tahap perkembangan sejarah tertentu. Misalnya, sebelum abad ke-18, masyarakat sipil pada umumnya didefinisikan dan dipahami dengan cara yang sama dengan negara, sehingga istilah masyarakat sipil dan negara sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada hal yang sama. Baru pada kuartal terakhir abad ke-18 istilah tersebut berubah artinya. Konsep masyarakat sipil dipahami sebagai entitas yang berhadapan dengan negara (Asfar, 2001).

Keterbatasan ruang dan peran aktor masyarakat sipil dalam memajukan agenda perubahan yang lebih humanis telah mengubah pola gerakan yang diinginkan oleh para aktivis sosial. Semula, gerakan ekstra-parlementer merupakan keputusan aktor-aktor masyarakat sipil. Namun baru-baru ini, para aktor masyarakat sipil menyadari bahwa salah satu ketidakefektifan gerakan tersebut berasal dari pembatasan masyarakat sipil sebagai kelompok kepentingan daripada kelompok pembuat keputusan legislatif (Perdana, 2009). Keterlibatan masyarakat madani atau

DAFTAR PUSTAKA

Asfar, M. (2001). Wacana Civil Society dan Relevansinya di Indonesia. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, *1*(1), 49–60.

Fazillah, N. (2017). Konsep Civil Society Nurcholish Madjid dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer. *A-Lubb*, *2*(1), 206–225.

Ilma, M., & Alfian, R. N. (2020). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(01), 25–46. https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2186

Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar* (Revisi). Sinar baru Algensindo.

Khalik, A. T. (2012). Masyarakat Madani dan Sosialisme. *TAPIs*, *8*(2), 30–45. https://doi.org/10.1057/9781137312891

Mas'oed, M., & Andrews, C. (1986). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.

Naning, R. (1982). *Pendidikan Politik dan Regenerasi*. Liberty Pahmi.

Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, *6*(1), 141–152.

Perdana, A. (2009). Civil Society dan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia. *Seminar Internasional: Dinamika Politik Lokal Di Indonesia*, 28–30.

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 44. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385

Soeharto, A. (2011). Urgensi Pendidikan Politik Nagi Perempuan. *Muwazah – Jurnal Kajian Gender: Jurnal Kajian Gender*, *vol 3*, *No*, 325–333.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 11: *GOOD GOVERNANCE* DAN BIROKRASI

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 11

GOOD GOVERNANCE DAN BIROKRASI

A. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang *good governance* telah lama dikampanyekan di Indonesia sejak 1998, kampanye semakin gencar dilakukan seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari makin buruknya kinerja birokrasi dan maraknya korupsi berdampak pada pelayanan yang tidak professional, tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu birokrasi Indonesia juga masih tidak rasional dimana gemuk kaya akan lapisan struktural, namun miskin fungsi kontribusional, tidak netral dan tidak transparan. Hal-hal seperti ini menjadi kendala serius bagi birokrasi yang semestinya lebih progresif dalam merespon perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Zuhro, 2016).

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006),

DAFTAR PUSTAKA

Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi* (terjemahan, 2007). Tiara Wacana, Yogyakarta.

Barzelay, Michael. 1994. *Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Government*. University of California Press. Berkeley.

Bovaird, Tonny dan Elke Loffler. 2003. *Public Management and Governance*. London.

Frederickson, H.G. 1997. *The Spirit of Public Administration.* JerseyBass Publisher. San Fransisco.

Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.

Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Development – A Policy Document*. UNDP. New York.

Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press. USA.

Zuhro, R. S. 2016. *Good governance dan reformasi birokrasi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta. Indonesia.

PEMBANGUNAN POLITIK

BAB 12: MOBILITAS SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PELEMBAGAAN SISTEM POLITIK

Robert Tua Siregar, Ph.D

Prodi S3 Manajemen Universitas Prima Indonesia

BAB 12

MOBILITAS SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PELEMBAGAAN SISTEM POLITIK

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pada negara-negara di belahan dunia yang menunjukkan pergerakan ekonomi dan pergeseran social sudah sangat mengglobal, salah satunya negara Indonesia. Pergeseran sosial dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia sejak awal kemerdekaan, masa orde lama dan era orde baru. Perubahan politik yang sangat signifikan dialami Indonesia sejak era reformasi memberi pengaruh pada kehidupan demokrasi dan pergerakan ekonomi lebih terbuka. Penggalian potensi-potensi yang ada secara fisik maupun non fisik lebih terbuka dan memberi arah kepada kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memberi kesempatan kepada kehidupan social dan membangkitkan mobilitas sosial. Perekonomian Indonesia mengalami kenaikan yaitu faktor eksport dan import. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu factor menempatkan negara Indonesia pada jajaran ekonomi dunia dalam kelompok negara G-20. Tentu, hal ini juga di ikuti oleh pergerakan social dan hal ini bukan tidak juga menimbulkan beberapa permasalahan. Namun, konsekuensi dari hal tersebut menjadikan perubahan pada berbagai kebijakan dan perubahan perlembagaan system politik yang ada. Pembangunan ekonomi tidak hanya memandang dari sisi kuantitasnya saja, tetapi turut memperhatikan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. Penekanannya turut diikuti dengan pembangunan bidang lainnya yang memengaruhi perbaikan taraf hidup masyarakat. Sehingga pembangunan ekonomi tak melahirkan berbagai masalah sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ballard, Parissa J, Alison K Cohen, and P Duarte. 2019. "*Can a School-Based Civic Empowerment Intervention Support Adolescent Health?" Preventive Medicine Reports* 16(August): 100968. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.100968.

Galuh, Universitas. 2020. "Pembangunan Politik Dan Kualitas Demokrasi." 6: 397–409.

Haridison, Anyualatha. 2013. "Modal Sosial Dalam Pembangunan." *Jispar* 2(2): 35–43.

Nababan, Tongam Sihol et al. 2023. "M*arket Structure, Conduct, and Performance of Star Hotels in North Sumatera, Indonesia*."

Raco, Mike. 2015. "*Sustainable City-Building and the New Politics of the Possible: Reflections on the Governance of the London Olympics* 2012." *Area*.

Robert Tua Siregar, et all. 2021a. *Ekonomi Pembangunan: Tinjauan Manajemen Dan Implementasi Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

———. 2021b. *KOMUNIKASI ORGANISASI*. 1st ed. Bandung.

———. 2023. *Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. ed. SE Lenny Dermawan Sembiring. Malang: Litnus.

Robert Tua Siregar Et All. 2021. *Ekonomi Industri*. Yayasan Kita Menulis.

Scott, Allen J. 2010. "Creative Cities: The Role of Culture." *Revue d'Economie Politique* 120(1): 181–204.

Siregar, R.T. et al. 2020. "Regional Development Environment: Implementation, Realization & Contribution of Revenue in Pematangsiantar." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*,.

Siregar, Robert Tua, D Ph, Yuris Danilwan, and D Ph. 2022. *Kebijakan Publik Dan Pembangunan Ekonomi*. 1st ed. Makassar.

Wibowo, Muhammad Ghafur, and Prodi. 2016. "Kebijakan Pembangunan Nasional: Dari Pertumbuhan (Growth) Menuju Kebahagiaan (Happiness)." *Asy-Syir'ah* 50(1).

PROFIL PENULIS

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian”. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

Dr. Dra. Dortje L. Y. Lopulalan, M.Si

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi iIlmu komunikasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Pattimura Ambon, dengan bidang konsentrasi pada Komunikasi Pembangunan dan Budaya, Nomor kontak 081343363109, E-mail; nor_lopulalan@yahoo.co.id. Hasil penelitian yang penulis hasilkan dan telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional, Prosiding Nasional maupun Internasional, diantaranya: *The Existence And Changes In The Use Of Local*

Language In The Family In The Middle Of The Current Modernity (An Analysis Study In Maluku Community), The Analysis of Social and Genetic Relationship Changes Among Buru Community from Contemporary Perspective. Bialahin Concept: Reflections on the Unity of the Buru People in Maluku, Pemberitaan Infotainment di Televisi dalam Industrialisasi Media, Strategi Komunikasi Adaptif Masyarakat Pesisir di Taniwel Timur, Mengemas Konten Lokal Dalam Pelestarian Budaya Pada Stasiun NetTV Ambon, Gender dan Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Pesisir Kota Ambon

Fahririn, S.H., M.H

Penulis lahir di padang tanggal 8 Desember 1992. Penulis adalah dosen tetap pada prodi ilmu hukum Universitas Sahid. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu hukum Universitas Andalas. Penulis menekuni bidang hukum pidana seperti hukum pidana, Kejahatan Korporasi, tindak pidana korupsi, kriminologi dan viktimologi. Selain mengajar penulis adalah Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum universitas sahid yang aktif memberikan pengetahuan seputar hukum disosial media seperti youtube dan tiktok

Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si

Penulis merupakan dosen FEB Universitas Muhammadiyah Bandung. Penulis menyelesaikan program S1 dan S2 di Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis adalah kandidat Doktor bidang *sustainability* pada Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran.

Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si

Penulis lahir pada tanggal 11 Mei 1983 di Desa Bulutellue, sebuah desa kecil yang bercorak agraris di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Meraih Sarjana Pendidikan Sejarah (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan tingkat magister pada Program Studi Antropologi, Bidang Kajian Utama Ilmu Sejarah pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan berhasil meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada tahun 2008. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan pada Program Studi Dirasat Islamiah, konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin dan berhasil memperoleh gelar Doktor (Dr) pada tahun 2017. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Mengampu beberapa mata kuliah antara lain: Agama dan Nasionalisme, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Islam dan Budaya Lokal, Sejarah Sosial Masyarakat Indonesia, Budaya Politik dan Kekuasaan, Antropologi Agama, dan Sejarah Kontemporer Politik Indonesia.

Muhammad Nazif, S.E., M.M., NCT., CPS., CDMS

Penulis merupakan putra Minangkabau asli kelahiran Bukittinggi 12 Agustus 1986. Setelah meluluskan pendidikan sekolah menengah di SMA N 1 Bukittinggi, penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Padjadjaran Bandung Jurusan Manajemen. Jenjang magister beliau selesaikan di Universitas Andalas Padang dengan Konsentrasi Manajemen Keuangan. Penulis juga mengabdikan diri sebagai dosen tetap di Prodi Bisnis Digital dan mengampu mata kuliah Enterpreneurship serta Digital Global Marketing di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi. Selain itu, penulis juga berprofesi sebagai pengusaha, yang mana sampai saat ini penulis sudah mendirikan 3 perusahaan yang bergerak di bidang perizinan dan legalitas usaha, *Event Organizer* serta mengembangkan

sebuah *platform* berbasis *e-commerce* di Sumbar dengan brand Ikomart.id. Penulis sangat aktif berorganisasi dan juga dalam sosial masyarakat, keahlian dan sertifikasi penulis dalam mengembangkan UMKM Sumbar juga menjadikannya sebagai *Keynote Speaker* atau Narasumber dalam kegiatan-kegiatan UMKM dan Kewirausahaan, baik yang dilakukan oleh Dinas terkait atau juga pihak swasta di Sumatera Barat. Penulis sudah mempunyai sertifikasi profesi tingkat nasional, antara lain Sertifikasi Trainer Nasional (NCT), Sertifikasi skema pendamping UMKM, sertifikasi *Public Speaking* (CPS) dan sertifikasi *Digital Marketing Spesialis* (CDMS). Selain itu selama setahun terakhir penulis diminta bergabung oleh Bupati Agam untuk menjadi bagian dari Tim Tenaga Ahli (TA) Bupati Agam, Sumatera Barat yang membidangi pengembangan UMKM.

Andi Hartati, S.Sos., M.A

Penulis lahir di Bantaeng, 8 April 1985. Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu pada Tahun 2006. Lulus S2 pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2009. Saat ini merupakan dosen tetap Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2011-2015, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2015-2019 dan menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan periode 2019-2023. Buku yang sudah diterbitkan antara lain Buku Metodologi Penelitian Sosial, Desa dan Bumdes, dan Pengantar Ilmu Komunikasi. Beberapa hasil penelitian kerja sama antara pemerintah daerah antara lain; Indeks Pembangunan Gender, Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai. Google scholar id. VFx_kD4AAAAJ, Orcid id. http://0000-0002-6267-2705, Scopus Id. 57561631800.

Rahmad Palopa, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di Luwuk, 13 Oktober 1982. Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk Banggai pada Tahun 2007. Lulus S2 pada Program Studi Kebijakan Publik Universitas Tadulako Palu pada Tahun 2014. Mahasiswa Aktif Tahun 2022 Pada Program Doktoral (S3) Ilmu Sosial BKU Administrasi Publik Universitas Tadulako Palu. Saat ini merupakan dosen tetap Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Menjabat sebagai Dekan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tompotika Luwuk Banggai pada periode 2016-2020 dan periode 2020-2024. Penulis juga aktif sebagai pembicara dan sebagai salah satu tim penguji eksternal kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bacaleg untuk pemilu 2024 serta salah satu Tim Penyusunan Naskah Akademis Terkait Studi *Stakeholder Engagement* Di Wiliayah Kerja JOB Tomori Tahun 2022. Google scholar id. iYp6wGQAAAAJ.

Dr. Yeyen Subandi, S.I.P., M.A

Penulis memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar Master of Arts dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktoral Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di Non-Governmental Organization (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank. Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor,

kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos

Penulis kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibarusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Dan untuk saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Politik di Universitas Diponegoro (UNDIP). Aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Dan Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE

Penulis lahir di Magelang pada 08 Maret 1985. Mengenyam pendidikan S1 Jurusan Arkeologi, Universitas Gadjah Mada dan S2 di STPMD “APMD” Yogyakarta pada Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi pada jenjang S3 di prodi Doktoral Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya. Penulis tinggal di Yogyakarta dan aktif sebagai dosen di STIPRAM Yogyakarta pada Jurusan Pariwisata, giat menulis pada bidang pariwisata, sosial, politik, dan pemerintahan.

Selain itu penulis juga merupakan seorang *foodpreneur*, dan menggeluti bisnis kecantikan. Penulis dapat dihubungi pada alamat email vinapratama@gmail.com

Robert Tua Siregar, Ph.D

Penulis **l**ahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 November 1967. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Teknik Manajemen Industri pada 06 Januari 1992, dan Sarjana Sospol pada 04 November 1992. Ia merupakan alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja XII Medan dan Sosiologi Fakultas Sospol Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 1998 mengikuti Program Tugas Belajar pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus pada tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 2007 menjalani Tugas Belajar Doktor Falsafah Bidang Urban & Regional Planning pada University Of Malaysia. Sejak tahun 1994 menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta di Pematangsiantar, dan pada tahun 2012 beralih fungsi status dari Pegawai Pemerintahan menjadi Dosen DpK di Universitas Swasta Pematangsiantar dan ditempatkan di Program Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dan Fakultas Ekonomi pada program studi pembangunan. Saat ini Dosen di Program S3 dan S2 Universitas Prima Indonesia Medan. Email: tuasir@gmail.com

PEMBANGUNAN POLITIK

Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & Nurcholis, n.d.). Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional (1) Geografis berarti bahwa perubahan politik telah terjadi di negara berkembang menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara maju. Tentu saja fenomena ini mempengaruhi kapasitas dan ketidakstabilan sistem politik. (2) Turunan berarti bahwa pembangunan politik adalah bagian dan konsekuensi politik dari proses perubahan umum, yaitu konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media dan banyak lagi. (3) Tujuan politik dipahami sebagai proses perubahan menuju tujuan tertentu dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, penegakan hukum, pemerintahan yang baik, dll. (4) Proses perubahan menuju sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh negara sudah berjalan.

Objek formal pembangunan politik terletak pada berfungsinya sistem politik itu sendiri. Berfungsinya sistem politik mempengaruhi dinamika dan mobilisasi kekuasaan. Dengan satu syarat, jika sistem politik dapat disesuaikan dengan tujuan politik individu atau kelompok, maka sistem itu akan terbentuk. Sebaliknya, ketika sistem politik tidak lagi mampu memberikan apa yang diinginkannya, stabilitasnya akan dipertanyakan. Akibatnya, setiap individu dan kelompok kepentingan mendekonstruksi sistem politik dan berubah. Pembangunan politik selalu berarti perubahan, bukan sebaliknya. Memang di satu sisi perubahan diperlukan untuk pembangunan, namun di sisi lain perubahan juga dapat menghambat pembangunan, padahal pengaruh perubahan sosial dapat merangsang pembangunan. Dialektika antara pembangunan dan perubahan sosial selalu ambigu dan dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-459-1
9 786234 594591